



18 Wilayah Jadi Prioritas, DIY Kejar Kemiskinan 8,66%

JOGJA—Pemda DIY memfokuskan upaya pengentasan kemiskinan di 18 wilayah prioritas yang terdiri atas 15 kapanewon dan tiga kemitraan. Melalui pendekatan berbasis wilayah tersebut, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 8,66% pada akhir 2027, setelah berhasil ditekan menjadi satu digit pada Maret 2026.

Antisul Umah, David Kurniawan & Khairul Ma'arif
redaksi@harianjogja.com

Strategi itu ditempuh melalui tiga pendekatan utama, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan warga, serta memperkuat intervensi di kantong-kantong kemiskinan (lihat grafis).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY, Danang Setiadi, mengatakan angka kemiskinan DIY pada Maret 2026 turun menjadi 9,70% dari 10,08% pada September 2025. Capaian tersebut sekaligus memenuhi target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY 2026 sebesar 9,13%-9,90%.

"Untuk RKPD DIY Tahun 2027, angka kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 8,5 persen hingga 9,5 persen," ujarnya, Kamis (6/8).

Menurut Danang, keberhasilan menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit tidak lepas dari integrasi tiga strategi

- ▶ Keberhasilan DIY menurunkan angka kemiskinan merupakan hasil kolaborasi antara Pemda DIY dan pemerintah kabupaten/kota.
- ▶ Bantuan sosial tidak dapat menjadi satu-satunya instrumen pengentasan kemiskinan.

utama yang dijalankan Pemda DIY.

"Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di DIY cukup efektif karena mengintegrasikan strategi mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan," katanya.

Ia menambahkan, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemda DIY, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi, media, organisasi masyarakat, hingga lembaga filantropi.

"Kami bersyukur angka kemiskinan DIY akhirnya mencapai satu digit. Ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan," ujarnya.

▶ Halaman 10

MEMPERSEMPIT KANTONG KEMISKINAN DI DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat angka kemiskinan satu digit sebesar **9,70%** pada **Maret 2026**. Di balik capaian tersebut, Pemda DIY memfokuskan intervensi di 18 wilayah prioritas melalui strategi mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan mempersempit kantong kemiskinan.

KANTONG KEMISKINAN PRIORITAS

Pemda DIY menetapkan 15 kapanewon dan 3 kemitraan sebagai lokasi penanggulangan kemiskinan.

SLEMAN:
Tempel.

KOTA JOGJA:
Umbulharjo, Gondomanan, Danurejan.

GUNUNGKIDUL:
Tepus, Rongkop, Ponjong, Semin, Gedangsari, Playen, Saptosari.

KULONPROGO:
Kokap, Sentolo, Pengasih, Girimulyo.

BANTUL:
Dlingo, Imogiri.

TIGA STRATEGI UTAMA

- 1 Mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan sosial, JSLU, Jamkesmas Terpadu, administrasi kependudukan kelompok rentan, beasiswa, dan program sejenis.

- 2 Meningkatkan pendapatan melalui Lumbung Mataraman, Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Lele Gacor, Desa Mandiri Budaya, Sibakul-MarketHub, Desa Prima, Momenku Siap Berkemas, dan pelatihan kewirausahaan.

- 3 Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui penyediaan air minum, pengelolaan sumber daya air, pemanfaatan kawasan strategis, optimalisasi Tanah Kas Desa/Tanah Kasutapan untuk pertanian, dan Reformasi Kalurahan.

DASAR PENETAPAN WILAYAH

- 1 Jumlah penduduk miskin di suatu wilayah.

- 2 Kondisi rumah tidak layak huni.

- 3 Akses terhadap air bersih dan kondisi lingkungan.

Ni Made Dwipanti Indrayanti
Sekretaris Daerah DIY

Sumber: Bapperida DIY, Data DIY 2026

18 Wilayah...

Untuk mempercepat penurunan kemiskinan pada 2027, Pemda DIY menetapkan 15 kapanewon dan tiga kemitraan (*lihat gratis*), sebagai lokus penanggulangan kemiskinan melalui Surat Edaran Wakil Gubernur DIY selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) DIY Nomor 400.9.14/6076.

Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan penetapan wilayah prioritas didasarkan pada sejumlah indikator, seperti jumlah penduduk miskin, kondisi lingkungan, rumah tidak layak huni, hingga akses terhadap air bersih.

Meski demikian, intervensi penanggulangan kemiskinan tetap dilakukan di seluruh wilayah DIY. "Kami tidak berpuas diri setelah mencapai satu digit. Masih banyak yang harus kami dorong dan evaluasi," katanya.

Menurut Ni Made, bantuan sosial tidak dapat menjadi satu-satunya instrumen pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat harus menjadi fokus utama agar warga mampu mandiri secara ekonomi.

Strategi Daerah Berbeda

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin DIY pada Maret 2026 mencapai 408.870 jiwa, turun dari 422.790 jiwa pada September 2025. Penurunan sebesar 0,38 poin persentase tersebut menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa.

Masing-masing kabupaten kemudian menyusun strategi sesuai karakteristik wilayahnya.

Di Gunungkidul, pemerintah daerah memperkuat sinkronisasi program dengan Pemda DIY. Ketua TKPKD Gunungkidul,

Joko Parwoto, mengatakan koordinasi dilakukan untuk menyelenggarakan kebijakan, menetapkan prioritas program, dan memperkuat sinergi antarlembaga.

Program yang dijalankan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor pertanian dan pariwisata, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, pengembangan potensi lokal, dukungan kewirausahaan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan sanitasi dan air bersih, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.

Pemkab Gunungkidul menargetkan angka kemiskinan turun hingga sekitar 13%, bahkan diupayakan mencapai 12,5%, setelah menurun dari 15,18% pada 2024 menjadi 14,15% pada 2025.

Kulonprogo memadukan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kulonprogo, Diana Puspitasari, mengatakan pengurangan beban masyarakat dilakukan melalui bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, stabilisasi harga, PKH, Program sembako, PIP, BLT Desa, bantuan pangan, rehabilitasi sosial, subsidi energi, hingga bantuan iuran JKN.

Sementara peningkatan pendapatan ditempuh melalui program padat karya tunai, pelatihan vokasi, Kartu Prakerja, pendampingan UMKM, perluasan akses pasar, serta pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kulonprogo juga menyiapkan inovasi Pramana (Priksa lan Pilah Data Warga Miskin Kanthi Nyata) untuk memperkuat verifikasi dan validasi data

warga miskin.

Di Bantul, strategi difokuskan pada integrasi 103 program penanggulangan kemiskinan dari 13 perangkat daerah dengan pembaruan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DITSEN).

Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, mengatakan pembaruan data dilakukan secara berkelanjutan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan mengurangi tumpang tindih penerima manfaat.

Saat ini angka kemiskinan Bantul tercatat 11,54%, sedangkan prevalensi stunting turun dari 9,05% pada 2025 menjadi 8,31% pada 2026.

Di Sleman, program pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas meskipun dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat menurun.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia Bappeda Sleman, Bhibid Nuliarta Abdi Negara, mengatakan anggaran untuk program kemiskinan tidak dipangkas. Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), jaminan kesehatan masyarakat miskin, bantuan pendidikan, bantuan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak telantar tetap berjalan.

Menurut Bhibid, intervensi dilakukan di seluruh kapanewon sesuai karakteristik wilayah, bukan hanya pada daerah yang menjadi lokus prioritas.

"Kami menargetkan penurunan kemiskinan di seluruh kabupaten. Jangan sampai wilayah di luar lokus justru terabaikan," katanya.

Ia menambahkan, koordinasi antara pemerintah pusat, Pemda DIY, dan pemerintah kabupaten terus diperkuat agar program penanggulangan kemiskinan saling melengkapi dan lebih efektif. (Andreas Yuda Pramono)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005